

Volume 1 Nomor 2, November 2011



# JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM BENGKOELLEN JUSTICE

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum FH UNIB

EKSI BUKU  
ASARJANA ILMU HUKUM  
ITAS HUKUM  
ITAS BENGKULU

05  
UR  
21

Filsafat Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Hukum  
Ekonomi Indonesia

Penyuapan Terhadap Hakim (Suatu Kajian Yuridis Dan Filosofis)

Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Menurut Hukum Adat  
Rejang di Kabupaten Kepahiang

Kegagalan Pendidikan Hukum di Indonesia (Internalisasi Hukum yang Belum Sesuai  
dengan Falsafah Bangsa Indonesia)

Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pesawat Atas  
Kerugian yang Disebabkan oleh Perjanjian Baku pada Tiket  
Pesawat Ditinjau Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia

Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan dalam  
Pelaksanaan Pembinaan Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995

Penataan Ruang Mikro Berbasis Pertanian Berkelanjutan  
(Perlindungan Hak-Hak Petani Atas Tanah Pertanian di  
Kabupaten Bengkulu Tengah)

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada  
PT. Bengkulu Mandiri dalam Rangka Pengembangan  
Perekonomian Provinsi Bengkulu



## DAFTAR ISI

Filsafat Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Hukum  
Ekonomi Indonesia

**Candra Irawan**

1-29

Penyuapan Terhadap Hakim (Suatu Kajian Yuridis Dan Filosofis)

**Djoko Sumaryanto**

30-44

Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Menurut Hukum Adat  
Rejang di Kabupaten Kepahiang

**Edytiawarman**

45-59

Kegagalan Pendidikan Hukum di Indonesia (Internalisasi Hukum  
Belum Sesuai dengan Falsafah Bangsa Indonesia) yang

**Akhmad Muslich**

60-72

Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pesawat Atas  
Kerugian yang Disebabkan oleh Perjanjian Baku pada Tiket  
Pesawat Ditinjau Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia

**Eldi Nasali**

73-105

Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan dalam  
Pelaksanaan Pembinaan Berdasarkan Undang-Undang  
No. 12 Tahun 1995

**Sulis Setyowati**

106-123

Penataan Ruang Mikro Berbasis Pertanian Berkelanjutan  
(Perlindungan Hak-Hak Petani Atas Tanah Pertanian di  
Kabupaten Bengkulu Tengah)

**J.T. Pareke**

124-136

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada  
PT. Bengkulu Mandiri dalam Rangka Pengembangan  
Perekonomian Provinsi Bengkulu

**Rohmulyati**

137-154

## **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI KABUPATEN KEPAHANG**

**Oleh**  
Edytiawarman

### **Abstract**

*The research is aimed to the study aims to explain the inheritance of land dispute resolution process and to determine the factors inhibiting the settlement of land disputes inheritance according to customary law in the District Kepahiang. The data is collected through study of documentation for secondary data and interviews for primary data. Determination of sample is done by purposive sampling method, the sample is determined by deliberately based on a certain considerations and data analysis done using qualitative analysis. The results showed that the resolution of the dispute settlement under Customary Law Rejang event of a dispute in the division of inheritance is done by consensus, if not obtained the results of deliberation, it can be resolved by consensus with the involvement of indigenous peoples and chairman of the figures by taking into account customary forms of marriage done by parents heirs. If these efforts do not succeed, then it can be pursued through the courts by filling a lawsuit to the court of law in the region of the heirs concerned. That the limiting factor in the resolution of the dispute is when the division of inheritance is not uneven and would control the entire estate, one of the principle that the rights as heir male larger than female heirs. Male heirs is difficult to consulted, so that should be involved a respectation of party to reconcile them or it could be through the village head/chairman of the local custom.*

*Keywords: Settlement of land disputes inheritance, customary law*

### **A. PENDAHULUAN**

Dikalangan suku bangsa Rejang di wilayah Lebong, Rejang Lebong dan Rejang Bermani Ilir jika si suami atau si isteri meninggal dunia, maka anak lelaki yang tertua mempusakai harta peninggalan mendiang. Jika tidak ada anak lelaki yang tertua atau sama sekali tidak ada

anak, maka harta peninggalan itu jatuh kepada ahli waris si suami. Lazimnya di wilayah Rejang anak-anak mendiang adalah ahli waris dan bahagian masing-masing sama, kecuali anak lelaki yang tertua akan mendapat lebih dari yang lain-lain. Dasar pemberian diatas adalah sesuai dengan cara berfikir mereka, di tempat anak yang tertua itulah mereka adik

beradik berkumpul untuk membicarakan dan memufakatkan segala sesuatu yang penting mengenai suku mereka, ke sanalah pula mereka kembali, jika dikemudian hari mereka tidak punya tempat tinggal lagi. Kedudukan anak tertua tersebut didalam istilah adat Rejang dinamakan *Tuban Beun* (bagian lebih). Lazimnya ahli waris lain tidak menaruh keberatan terhadap *Tuban Beun* tersebut, karena siapa diantara mereka berkeberatan, maka anak tertua menurut adat dapat menuntut *Pelapin Baw* sejumlah 24 Rial dari tiap-tiap ahli waris yang keberatan. *Pelapin Baw* ini merupakan upah dari adik-adiknya mendukung kakak tertua.

Hukum waris banyak benar hubungannya dengan hukum-hukum lain yang terdapat di dalam masyarakat suku bangsa Rejang. Misalnya, hubungan hukum waris dengan hukum tanah, yaitu hak peserta para anggota masyarakat atau hak bersama masyarakat hukum adat yang membatasi pewarisan tanah. Hubungan hukum waris dengan hukum perkawinan, bentuk perkawinan, ialah bentuk perkawinan mempengaruhi susunan ahli waris dan hubungan dengan hukum

kesanaksaudaraan yang menjadi pangkal bertolak bagi susunan ahli waris, yaitu si anak mewarisi hanya dari orang-orang yang sesuku dengannya. Jika seorang meninggal dunia, maka pada umumnya ia meninggalkan harta dan harta itu disebut dalam hukum adat Rejang dengan "harta pusako". Harta pusako ini pada umumnya terdiri dari sebidang ladang, sebidang kebun, atau sebidang sawah, sebuah rumah dengan pekarangannya, perkakas rumah tangga, perkakas dapur, beberapa ternak dan barang-barang perhiasan. Sudah menjadi kebiasaan suku bangsa Rejang, bahwa tanah-tanah kebun (kebun durian, kebun kelapa, kebun damar, kebun sialang dan lain-lain) tidak dibagi-bagikan, tetapi tetap merupakan kepunyaan seluruh suku dan memang diperuntukkan bagi kepentingan suku itu.

Siapa ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia harus dicari dalam kalangan keluarga mendiang. Dahulu kala, pada waktu larangan kawin sepetulai pada suku bangsa Rejang berlaku dengan keras, syarat yang paling azazi untuk menjadi ahli waris ialah sekurang-kurangnya harus sepetulai dengan si pewaris. Dewasa ini menurut hukum adat Rejang, pada umumnya ahli waris dari seorang yang telah meninggal adalah anak-anak mendiang

dengan tambahan restrisi. Perlu diketahui pula apa bentuk perkawinan si anak itu lahir.

Jika bentuk perkawinan bagi anak perempuan adalah kawin *jujur* (beleket) maka anak perempuan itu buat sementara waktu dilepaskan haknya dari kewarisan, karena jika suaminya meninggal dunia ia menggantikan kedudukan suaminya dalam waris. Jadi tegasnya anak perempuan yang kawin *jujur* buat sementara waktu disingkirkan, yaitu selama masa perkawinannya, karena jika ia sarak dalam pengertian bukan sarak mati, maka ia kembali menjadi ahli waris dari orang tuanya. Dalam hal sarak atau cerai mati, ia baru mendapat hak warisnya, jika ia berdiam di tempat dusun orang tuanya yang meninggal itu dan meninggalkan harta pusako yang diterimanya sebagai pengganti mendiang lakinya, kepada suku lainnya. Jika bentuk perkawinan bagi anak lelaki adalah kawin *semendo* tabik anak, maka ia tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya. Jadi tegasnya, bagi anak lelaki, dengan tidak memandang apa bentuk perkawinannya, apakah anak itu akan mempergunakan haknya itu

atau tidak, adalah merupakan soal lain.

Jika bentuk perkawinan adalah kawin *semendo* raja-rajo, maka si anak sama ada ia lelaki ataupun perempuan, adalah ahli waris dari kedua orang tuanya. Jika salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka yang masih hidup tidak mengganti si mati dalam kedudukan mendiang sebagai ahli waris, sebagaimana kita dapat mengetahuinya dalam bentuk perkawinan *jujur*. Tempat berdiam juga tidak mempengaruhi kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam bentuk kawin *semendo* raja-rajo.

Kedudukan si anak akibat kelahirannya dari suatu bentuk perkawinan, pada dasarnya adalah anak-anak itu merupakan ahli waris, hanya dari orang-orang yang masuk suku mereka.

Apabila anak lahir dari perkawinan bentuk beleket, maka ia merupakan ahli waris dari famili (karib) ayahnya saja. Jika anak itu menetap di dusun ibunya, maka ia merupakan ahli waris pula dari karib ibunya. Tetapi apabila ia kemudian kembali lagi berdiam di dusun ayahnya, maka harta pusako yang diperolehnya dari pihak ibunya harus ditinggalkan di dusun ibunya, selama harta itu masih ada.

Perkembangan kearah kawin sedusun mempengaruhi kedudukan si anak, yaitu si anak merupakan ahli waris baik dari pihak famili ibunya. Apabila si

anak lahir dari perkawinan bentuk semendo tabik anak, selagi si anak itu berdiam di dusun ibunya, mereka merupakan ahli waris dari karib ibunya. Jika kemudian anak-anak yang masuk suku ayahnya pindah bertempat tinggal ke tempat dusun ayahnya, maka harta pusako yang diterimanya dari pihak famili ibunya yang masih ada ditinggalkannya di dusun ibunya itu dan diuntungkan bagi ahli waris dari famili ibunya yang menetap di dusun ibu itu.

Demikian juga proses dengan anak-anak yang masuk suku ibu tetapi dengan sukarela berpindah ke tempat dusun ayah. Semua anak yang berdiam di dusun ayahnya merupakan ahli waris dari keluarga ayahnya. Juga dibentuk kawin semendo tabik anak ini perkembangan kearah kawin sedusun mempengaruhi kedudukan si anak sebagai ahli waris, yaitu si anak merupakan ahli waris baik dari keluarga ayah maupun dari pihak keluarga ibunya. Apabila si anak lahir dari perkawinan bentuk kawin semendo rajo-rajo, maka si anak merupakan ahli waris baik dari keluarga ayah maupun dari pihak keluarga ibunya dengan tidak

menghiraukan dimana mereka bertempat tinggal.

Dalam perkembangan selanjutnya pada akhir-akhir ini, terutama dimana telah banyak sekali terjadi perkawinan antara orang-orang sedusun, dimana pada dewasa ini kawin semendo rajo-rajo mulai banyak dilangsungkan disamping peristiwa di sana-sini dikalangan suku bangsa Rejang timbulnya kejadian-kejadian perubahan kawin semendo rajo-rajo, nampak bahwa si anak sekarang ini merupakan ahli waris baik dari keluarga ayahnya maupun keluarga ibunya dengan tidak memandang lagi dari bentuk perkawinan apa si anak lahir.

Seterusnya hukum adat Rejang menentukan jika si anak tidak ada, maka digantikan dengan cucu dan jika cucu tidak ada, diganti dengan piut sebagai ahli waris dari si pewaris. Jadi diambil dulu turunan kebawah dan jika turunan kebawah ini tidak ada lagi, yaitu seorang mati punah, maka digantikan dengan orang tua si pewaris atau salah satunya yang masih hidup.

Pandangan yang demikian, akan membawa konsekuensi yuridis dalam pembagian tanah warisan apabila tidak memperhatikan bentuk perkawinan yang dilakukan, di satu sisi si anak tertua masih ingin mempertahankan aturan pembagian tanah warisan menurut hukum adat Rejang, namun di sisi lain ada

anak yang tidak mau menggunakan aturan pembagian tersebut, akibatnya akan terjadi konflik dalam keluarga yang akan berlanjut ke arah persengketaan terhadap tanah warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya.

Persengketaan terhadap tanah warisan di daerah Kabupaten Kepahiang khususnya bagi masyarakat Rejang Bermani Ilir, cukup banyak terjadi dan apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka berlanjut ke Pengadilan. Apabila penyelesaian sengketa sudah ke pengadilan, maka proses pembagian tanah warisan akan menunggu putusan pengadilan terhadap pembagian tanah warisan tersebut. Bertolak dari latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah penyelesaian sengketa tanah warisan menurut Hukum Adat Rejang di Kabupaten Kepahiang Khususnya bagi masyarakat Rejang Bermani Ilir; (2) apakah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah warisan menurut Hukum Adat Rejang Bermani Ilir di Kabupaten Kepahiang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Subyek penelitian adalah warga masyarakat Rejang Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang yang sering mengalami konflik berkaitan dengan sengketa tanah warisan, dimana masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tentang penyelesaian sengketa melalui pranata perdamaian adat. Sumber data meliputi: buku-buku literatur yang berkaitan dengan judul penelitian, bahan-bahan hasil lokakarya, majalah ilmiah, dan peraturan adat Rejang Bermani Ilir. Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan, studi dokumentasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul baik data sekunder maupun data primer yang diperoleh dari lapangan, diolah dan diedit serta disusun secara sistematis. Data yang telah tersusun secara sistematis tersebut, dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan menggunakan cara berfikir baik secara induktif maupun secara deduktif, yaitu kesimpulan ditarik berdasarkan dari suatu pernyataan yang bersifat umum ke khusus atau sebaliknya. Sehingga hasil analisis tersebut dapat memberikan suatu thesa yang baru.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Rejang Bermani Ilir**

Pembagian harta warisan adalah merupakan suatu pembuatan daripada para ahli waris bersama-sama, serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama daripada para ahli waris. Apabila harta warisan dibagi-bagi antara para ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, di dalam suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan dari tiap-tiap ahli waris. Pembagian berjalan atas dasar kerukunan.

Didalam menjalankan kerukunan itu semua pihak mengetahui juga apabila ada pembagian yang menyimpang serta seberapa jauh penyimpangan tersebut dari peraturan-peraturan hukum adat mereka. Atas persetujuan semua pihak, tiap pembagian yang menyimpang dari peraturan hukum adat dapat diselenggarakan dan pelaksanaannya mengikat semua pihak yang telah bersepakat itu.

Bapak Haminin<sup>1</sup> selaku Ketua Adat Desa Kepahiang menjelaskan bahwa pada dasarnya pembagian harta

warisan menurut hukum waris adat Rejang menganut sistem individual dan kolektif, sistem individual yang dimaksud adalah bahwa harta warisan itu akan dibagikan pemiliknya dan penguasaannya kepada masing-masing ahli waris sebagai bagian yang ia terima dari haknya sebagai ahli waris. Harta yang dapat dibagikan secara individual adalah semua harta peninggalan pewaris, kecuali harta pusako yang sifat atau fungsinya tidak terbagi. Terhadap harta pusako itu tetap dimiliki secara bersama-sama diantara para ahli waris. Harta yang menurut sifatnya tidak terbagi itu adalah harta pusako yang mempunyai kekuatan magis, seperti keris, tombak, pedang dan benda pusaka lain. Sedangkan harta pusako yang menurut fungsinya tidak dapat dibagi adalah rumah asal atau rumah pusaka yang disertai dengan sebidang kebun atau sebidang sawah. Adapun latar belakang dari harta tersebut tidak dibagi menurut fungsinya, fungsi dari rumah pusaka itu adalah sebagai tempat para kerabat berkumpul dan musyawarah untuk membicarakan kepentingan para kerabat yang bersangkutan, sedangkan fungsi kebun dan sawah yang menyertai rumah pusaka itu adalah sebagai lahan cadangan untuk lapangan penghidupan bagi kerabat pewaris, jika sewaktu-waktu usahanya mengalami kemundur-

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Haminin selaku Ketua Adat Desa Dusun Kepahiang pada tanggal 19 Januari 2005.



an, maka lahan cadangan tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh kerabat pewaris.

Terdapat harta yang dapat dibagi pemiliknya secara individual, maka harta tersebut akan dibagi dan proses pembagiannya adalah sebagai berikut:

a. Waktu pembagian dan juru bagi

Pada masyarakat adat Rejang tidak menentukan secara pasti kapan waktu pembagian harta warisan itu dilaksanakan, tetapi pada umumnya pelaksanaan pembagian itu dilakukan setelah lewat 40 (keempat puluh) hari wafatnya pewaris, jika keturunan pewaris semuanya telah berdiri-sendiri atau menunggu sampai suasana tenang dalam keluarga pewaris, karena tidak mungkin pembagian harta warisan dapat dilaksanakan apabila dalam keluarga pewaris masih diliputi suasana duka cita.

Bapak Haminin<sup>2</sup> selaku Ketua Adat Desa Kepahiang menjelaskan bahwa dalam pembagian harta warisan itu dapat ditangguhkan apabila keturunan pewaris belum bisa berdiri sendiri. Jadi waktu dan tempat pelaksanaan pembagian harta warisan dapat

dikompromikan atau dimusyawarahkan oleh para ahli waris. Pada waktu dan tempat yang tidak ditentukan untuk melaksanakan pembagian harta warisan, pelaksanaannya dilakukan dengan cara musyawarah. Oleh karena itu, diharapkan semua anggota kerabat pewaris dapat hadir pada acara musyawarah. Musyawarah itu biasanya dipimpin oleh keturunan pewaris yang tertua (anak tertua), apabila anak tertua tidak cakap, maka musyawarah dapat dipimpin oleh keturunan pewaris yang lain, yang dianggap cakap dan mampu, atau dapat juga dipimpin oleh pewaris baru yaitu janda atau duda.

b. Cara Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Rejang tidak memakai secara limitatif, bagian untuk anak pria dan bagian untuk anak wanita. Menurut hukum waris adat Rejang anak pria dan anak wanita mempunyai hak yang sama untuk menerima harta warisan dari orang tuanya, namun mengenai porsi yang akan diterima tidaklah menjadi persoalan. Jadi pada dasarnya hukum waris adat Rejang menganut asas persamaan hak. Hak yang sama tidaklah berarti jumlah yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris adalah sama.

Bapak Haminin sebagai Ketua Adat Desa Dusun

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

Kepahiang<sup>3</sup> menjelaskan bahwa "dalam pembagian harta warisan itu dilakukan dengan menunjuk wujud tertentu dari harta warisan pewaris untuk dialihkan penguasaan dan pemilikan harta tersebut. Sebagai contoh pewaris mempunyai empat orang ahli waris yaitu: A, B, C, dan D. Sedangkan harta peninggalannya terdiri dari 3 (tiga) bidang kebun kopi, 2 (dua) bidang sawah, 1 (satu) buah rumah dan lain-lain." Maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut: 1 (satu) buah rumah dan 1 (satu) bidang sawah disisihkan sebagai harta yang dimiliki secara kolektif (bersama-sama) diantara keempat ahli waris tersebut. Sedangkan sisanya dibagikan sebagai berikut: untuk ahli waris A diberikan 1 (satu) bidang kebun kopi, ahli waris B mendapat 1 (satu) bidang kebun kopi dan 1 (satu) tanah pekarangan, ahli waris C mendapat 1 (satu) bidang kebun kopi, ahli waris D mendapat 1 (satu) bidang sawah dan tanah pekarangan.

Selain dari pada pembagian harta warisan diatas juga dikenal adanya hibah dan wasiat. Hibah

merupakan suatu lembaga hukum Islam yang telah menjadi adat yang diadatkan pada masyarakat Rejang. Hal ini merupakan perkembangan dalam waris adat Rejang karena pengaruh hukum agama Islam yang mereka anut. Dilaksanakannya hibah ini adalah:

- 1) Sebagai bekal bagi anaknya yang telah menjadi dewasa akan pergi meninggalkan rumah orang tuanya untuk mulai berumah tangga sendiri.
- 2) Pewaris merasa khawatir jangan sampai ada salah satu dari anaknya tidak mendapat pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia.

Sedangkan wasiat adalah dimana seseorang yang mempunyai harta kekayaan melakukan wasiat atas harta bendanya.

## **2. Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Menurut Masyarakat Hukum Adat Rejang Bermani Ilir**

Menurut Bapak Anang selaku Kepala Desa Marlakap,<sup>4</sup> bahwa dewasa ini sering terjadi proses perselisihan antara para ahli waris mengenai soal warisan. Perselisihan ini timbul karena adanya perbedaan pendapat para ahli waris mengenai tanah warisan. Apabila terjadi perselisihan tersebut diatas langkah penyelesaiannya ditempuh secara musyawarah, baik

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Haminin selaku Ketua Adat Desa Dusun Kepahiang pada tanggal 19 Januari 2005.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anang selaku Kepala Desa Marlakap, pada tanggal 19 Januari 2005.

melalui musyawarah keluarga maupun musyawarah adat. Tujuan dari musyawarah itu adalah untuk mencapai penyelesaian damai sehingga kerukunan keluarga dapat terpelihara dan masing-masing pihak yang berselisih dapat menerima hasil musyawarah itu. Adapun proses penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tersebut yaitu:

a. Musyawarah Keluarga

Musyawarah keluarga ini biasanya dipimpin oleh keturunan pewaris yang tertua, tetapi apabila itu tidak cukup, maka musyawarah dapat dipimpin oleh keturunan pewaris lain yang dianggap dan mampu serta bijaksana dengan mengambil tempat di rumah pewaris atau di tempat lain yang sudah ditentukan.

Pada bagian awal pimpinan musyawarah mengemukakan pokok persoalan yang menjadi sengketa, kemudian musyawarah mengemukakan nasihat dan petuah yang isinya menguraikan arti penting kerukunan hidup keluarga dan menguraikan akibat kalau sampai perpecahan keluarga pewaris. Setelah itu pimpinan musyawarah mempersilahkan anggota keluar-ga yang lain untuk me-

ngemukakan pandangan-pandangan mereka mengenai pokok persengketaan.

Setelah semua yang hadir mengemukakan pendapatnya, maka tibalah giliran yang berselisih paham untuk mengemukakan pendiriannya. Bila yang berselisih paham telah mencapai kesatuan pendapat berarti perselisihan dapat diatasi, tetapi ada kemungkinan dalam musyawarah keluarga tidak menghasilkan kesatuan pendapat, artinya masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya semula tanpa mau menerima hasil musyawarah tersebut. Bila pihak yang bersengketa tetap bertahan pada pendiriannya, maka langkah penyelesaian yang dapat diambil selanjutnya dapat ditempuh melalui musyawarah adat.

b. Musyawarah Adat

Musyawarah adat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam warisan, karena musyawarah keluarga tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut.

Bapak Anang<sup>5</sup> juga menjelaskan bahwa prosedur penyelesaian persengketaan melalui musyawarah adat sebagai berikut:

1) Salah satu pihak atau kedua belah pihak mengajukan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

permohonan penyelesaian sengketa kepada ketua adat, permohonan ini cukup disampaikan secara lisan dan langsung.

- 2) Setelah permohonan ini diterima oleh ketua adat kemudian ketua adat menetapkan hari, tanggal dan tempat musyawarah. Musyawarah itu langsung dipimpin oleh ketua adat dengan dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat serta kaum kerabat pihak sengketa.
- 3) Pada bagian akhir musyawarah tersebut dikenal dengan ketetapan musyawarah adat. Setelah musyawarah mengambil dan menetapkan putusannya, maka kepada pihak-pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk menentukan sikapnya, apakah masing-masing pihak itu menerima hasil musyawarah tersebut. Jika masing-masing pihak itu menerima hasil musyawarah tersebut, berarti dapat diselesaikan, akan tetapi jika masing-masing pihak atau salah satu pihak menolak hasil musyawarah tersebut maka kepada pihak-pihak diberi hak untuk mengajukan sengketa mereka untuk diselesaikan melalui pengadilan yang ber-

wenang yaitu Pengadilan Negeri. Bila persoalannya sampai ke pengadilan negeri, maka prosedur penyelesaiannya mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata.

Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi di Bermani Ilir dan diselesaikan secara kekeluargaan dan secara adat kasus yang disengketakan antara (Edi) dan (Caldin) sebelum orang tuanya meninggal, pewaris meninggalkan warisan harta peninggalannya berupa: (1) bidang kebun kopi; (2) bidang sawah dan satu buah rumah, maka cara pembagiannya masing-masing saudara Edi dan Caldin ini yang bernama Bobby mendapat 1 (satu) bidang kebun kopi, Yuhana mendapat 1 (satu) buah rumah. Sedangkan Edi dan Caldin mendapat masing-masing 1 (satu) bidang sawah dari 2 (dua) bidang sawah yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tetapi anak yang bernama Caldin tidak mendapat warisan peninggalan orang tuanya karena bagian Caldin diambil oleh Edi, yaitu 2 (dua) bidang sawah. Sedangkan amanat-amanat orang tuanya masing-masing anak mendapat satu (satu) bidang tanah peninggalannya tetapi ada salah satu pihak yang tamak, yaitu Edi tidak mau memberikan bagian 1 (satu) bidang sawah kepada Caldin, sedangkan Caldin berhak untuk memiliki sawah tersebut,



karena sawah tersebut secara tidak tertulis sah miliknya, dengan adanya permasalahan di atas maka timbul sengketa antara Edi dan Caldin. Kasus ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak dapat diselesaikan karena anak yang bernama Edi tidak mau mendengarkan nasihat saudara-saudaranya, lalu para pihak keluarga berkesimpulan untuk menyelesaikan kasus ini secara adat dan kedua belah pihak yang bersengketa diberi nasihat oleh kepala desa dan ketua adat, dan akhirnya kasus ini terselesaikan oleh lembaga adat kasus ini berjalan selama 6 bulan dan akhirnya anak yang bernama Edi memberikan hak Caldin berupa 1 (satu) bidang sawah sesuai dengan amanat kedua orang tuanya.

Tetapi tidak selamanya kasus sengketa tanah warisan dapat terselesaikan oleh keluarga ataupun lembaga adat ada satu kasus yang pernah terjadi di Embong Ijuk. Kasus tersebut, pernah diselesaikan secara musyawarah keluarga dan musyawarah adat namun kedua cara ini tidak menemukan jalan penyelesaian yang baik dan pada akhirnya kasus ini

masuk ke Pengadilan Negeri Curup.<sup>6</sup>

Kasus sengketa tanah rumah Luas 1.350 meter persegi antara Aradis dan pamannya Topok. Asal mula sengketa, Aradis 35 tahun, seorang petani mempunyai sebidang tanah pekarangan dan rumah seluas 1.35 M3 yang terletak di Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tanah tersebut adalah warisan peninggalan ayah dan ibunya.

Pada tahun 1983, Aradis bermaksud untuk membuat rumah di bagian depan. Berhubung pamannya Topok mendiami bagian depan yang ingin dibangun oleh Aradis, maka Aradis mengajak pamannya untuk berunding secara kekeluargaan, untuk memindahkan rumah pamannya ke belakang dan pamannya menyetujui permintaan keponakannya (Aradis) asalkan Aradis memberikan biaya sebesar Rp. 200.000,00 untuk biaya memindahkan rumah. Ternyata waktu itu (Aradis) tidak memiliki uang sebesar Rp. 200.000,00 lalu Aradis menawarkan uang kepada pamannya sebesar Rp 100.000,00, oleh pamannya saat itu dijawab untuk sementara akan dipikir dahulu. Namun selang beberapa minggu pamannya mendapat bujukan dari pihak ketiga. Akibat mengubah pikiran pamannya

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Embong Ijuk tanggal 19 Januari 2005.

(Topok) yang semula akan pindah ke belakang, dan berbalik tidak ingin pindah ke belakang, bahkan sampai berani mengatakan bahwa tanah pekarangan tersebut adalah tanah warisan dan berhak penuh memilikinya. Sedangkan tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Aradis dengan adanya campur tangan pihak ketiga maka timbullah sengketa antara Aradis dengan pamannya (Topok) bahkan persoalan ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan secara adat namun hasilnya tidak menemukan jalan keluar seperti yang diharapkan. Karena berbagai macam jalan untuk menyelesaikan persoalan tersebut tidak membuahkan hasil maka sengketa tanah rumah yang disengketakan. Akhirnya persoalan tersebut jatuh ke Pengadilan Negeri Curup.

Karena Aradis tidak tahu-menahu soal hukum persengketaan tanah, di samping itu juga keadaan keluarganya tergolong tidak mampu, sehingga tidak dapat berbuat banyak kecuali hanya sebagai pendengar. Walau diyakini bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya almarhum, praktis kini menjadi miliknya. Namun di

dalam persidangan (Aradis) dikalahkan oleh pamannya (Topok), sedang paman yang tadinya menumpang di pekarangan miliknya menang. Dikarenakan para saksi yang mengetahui bahwa tanah pekarangan dan rumah tersebut betul-betul milik ayahnya, berbalik mengatakan dalam persidangan tidak tahu menahu persoalan tersebut.

Setelah beberapa bulan Aradis bersama saudaranya yaitu Mulyadi untuk menyuruh Aradis untuk mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Curup dengan membawa bukti dan surat-surat bahwa tanah tersebut benar-benar milik Aradis bukan milik pamannya (Topok). Waktu itu Aradis dan saudara (Mulyadi) minta petunjuk tentang penyelesaian tanah warisan kepada kepala Desa Embong Ijuk yaitu (Rozik). Kasus ini berjalan selama 2 (dua) tahun setelah Pengadilan Negeri Curup melihat bukti-bukti dan saksi maka pada akhirnya hakim Pengadilan Negeri Curup memutuskan bahwa tanah rumah dan pekarangan tersebut resmi menjadi hak milik Aradis dan menjadi putusan tetap Pengadilan Negeri Curup.

Apabila kasus sengketa yang sudah masuk ke Pengadilan Negeri Curup, kasus ini diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan jalan hukum yang berlaku. Didalam suatu

perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Curup, hakim sangat berperan penting di dalam memutuskan suatu perkara atau memutuskan penyelesaian, kepada siapa yang berhak menerima warisan dan kepada siapa pula yang tidak berhak menerima warisan.

### **3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan**

Bapak Rozuk<sup>7</sup> selaku Kepala Desa Embong Ijuk mengatakan bahwa faktor penghambat dalam pembagian harta warisan sering terjadinya pertengkaran dalam keluarga, apabila dalam pembagian harta warisan yang tidak merata. Biasanya dalam pembagian yang tidak merata tersebut sering terjadi perselisihan pembagian harta warisan di lingkungan hukum adat Rejang pada hakikatnya adalah berdasar atas kerukunan diantara para ahli waris. Artinya dalam membagi harta warisan itu mereka tidak semata-mata memperhitungkan secara ilmu pasti nilai harga dari barang-barang tertentu yang dibagikan kepada mereka

masing-masing, asal mereka masing-masing menerima bagian yang banyak saja. Hakikat rasa keadilan yang harus diperlukan sejarah mungkin dan yang sesuai dengan suatu adat kebiasaan yang ternyata bertahun-tahun diuji bersama atas kebaikannya.

Dampak yang timbul dari pembagian warisan diserahkan kepada hukum adat membawa pengaruh diterima atau ditolak. Apabila pembagian menurut hukum adat tidak diterima, maka konsekuensinya akan terjadi suatu sengketa dalam pembagian warisan tersebut. Apabila terjadi suatu sengketa warisan, biasanya masing-masing ahli waris di suatu sisi berprinsip bahwa bentuk perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka juga menjadi landasan untuk melakukan pembagian harta warisan peninggalan orang tuanya tersebut. Disisi lain ahli waris berprinsip bahwa dalam pembagian warisan perlu diperhatikan bahwa kedudukan hak-hak mereka sebagai ahli waris adalah sama, baik ahli waris laki-laki ataupun ahli waris perempuan.

Selanjutnya Bapak Fadli selaku Kepala Desa Pagar Agung<sup>8</sup> mengatakan "dalam suku adat Rejang terutama di Bermani Ilir masih memegang teguh adat-istiadat bahwa anak laki-laki

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rozuk Kepala Desa Embong Ijuk pada tanggal 19 Januari 2005.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fadli selaku Kepala Desa Pagar Agung tanggal 19 Januari 2005.

tertua tidak sama pembagiannya dengan anak perempuan. Biasanya anak laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Tentunya masing-masing pihak akan mempertahankan hatinya dengan bersandar pada persamaan hak, karena dalam kehidupan manusia tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Faktor ini sangat mempengaruhi dalam penyelesaian sengketa tanah warisan, dengan adanya pembagian ada yang lebih dan ada yang kurang, dalam hal pembagian warisan tentunya akan timbul kecemburuan sosial antara kedua belah pihak dan juga apabila terjadi sengketa dalam ruang lingkup keluarga terutama tentang sengketa tanah warisan biasanya pasti timbul pertengkaran dan perselisihan. Dengan adanya faktor tersebut maka ada salah satu pihak yang bertahan ingin menguasai seluruh tanah warisan peninggalan orang tua atau peninggalan nenek-nenek mereka. Dari sinilah kita menemui jalan yang sulit untuk menyelesaikan persolan sengketa tanah warisan karena antara kedua belah pihak yang berselisih tersebut, sulit untuk

dipertemukan dan juga sulit untuk diajak berunding maka dari itulah apabila terjadi suatu sengketa kita memutuskan salah satu pihak dari pihak yang bersengketa atau pihak yang disegani untuk mendamaikan mereka atau bisa juga melalui kepala desa/ketua adat setempat.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Bahwa penyelesaian sengketa menurut Hukum Adat Rejang apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah kekeluargaan, apabila tidak diperoleh hasil musyawarah maka dapat diselesaikan secara musyawarah adat dengan melibatkan ketua adat dan tokoh-tokoh adat dengan memperhatikan bentuk-bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tua ahli waris. Apabila upaya ini tidak berhasil, maka dapat ditempuh melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah hukum para ahli waris yang bersangkutan.
- b. Bahwa faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah apabila pembagian harta warisan tidak merata dan mau menguasai seluruh harta warisan, salah satu pihak



berprinsip bahwa bagian hak sebagai ahli waris laki-laki lebih besar dari ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki sulit untuk diajak bermusyawarah, sehingga perlu melibatkan pihak yang disegani untuk mendamaikan mereka atau bisa juga melalui kepala desa/ketua adat setempat.

## 2. Saran

- a. Penyelesaian sengketa warisan sebaiknya melalui musyawarah kekeluargaan seyogyanya tetap diupayakan oleh kepala desa/ketua adat berdasarkan hukum adat Rejang agar perselisihan dalam pembagian harta warisan dapat diselesaikan secara adil.
- b. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan hendaknya mempunyai itikad baik agar sengketa tidak sampai diselesaikan di pengadilan dikarenakan dapat menyebabkan kecemburuan sosial karena ketidakpuasan atas putusan pengadilan diantara para pihak didalam keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980.
- Wirjono Prodjodikoro R., *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983.
- Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Soekanto, Soerojo, Sulaiman. B. Taneka, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1985.
- Ter Haar, 1985, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1980.